

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 95

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2006, *Informasi Tentang Kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan*, Jakarta: Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

Direktorat Bina Usaha Dan Pendaftaran Perusahaan, 2004, *Pedoman Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia.

Koesoemahatmaja, RDH, 1979, *Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.

Marbun, SF dan Moh. Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Prakoso, Djoko, 1982, *Kedudukan dan Fungsi Kepada Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya di dalam Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Ridwan, Juniarso dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit NUANSA, hal. 92.

Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit NUANSA.

Sarwoto, 1968, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, S.P., 1990, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

Sumitro, Ronny Hanitiyo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Spelt, N.M dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.

Stout, HD, 1994, *de Betekenissen van de Wet*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willnk.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

Peraturann Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

### C. Makalah

Bagir Manan, *“Ketentuan-ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945”*, Makalah, Jakarta, 1995.

